

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI

Nur Alhidayatillah

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Email : nuralhidayatillah@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui program rumah layak huni di Kabupaten Kampar. Beberapa persoalan muncul terkait program ini seperti: rumah yang dibangun tidak sesuai dengan perencanaan. Penetapan penerima tidak mengutamakan prioritas calon penerima. Persyaratan yang memberatkan. Munculnya kecemburuan sosial. dan peningkatan taraf hidup masyarakat belum terlihat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data penulis peroleh melalui proses wawancara. Observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini sebanyak 23 KK penerima rumah layak huni dan pemerintah Desa Sungai Jalau. Hasil kajian dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bentuk dan proses pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Desa Sungai Jalau belum maksimal. Kedua, kemampuan masyarakat miskin mengontrol lingkungan setelah mendapat rumah layak huni cukup bagus. Ketiga, kemampuan masyarakat miskin memenuhi aksesibilitas sumberdaya terkait dengan pekerjaan dan aktivitas sosialnya kurang bagus.

Kata kunci: pemberdayaan, masyarakat miskin, program rumah layak huni

Abstract

This study aims to explain the empowerment process of the poor in housing assistance program Kampar regency. It has been found that various issues have arisen about this program. Such as the house developed is not following the plan. Eligibility decisions do not prioritize potential recipients, burdensome requirements, social jealousy, and the improvement in living standards of the people is not significant. The method used in this study is a qualitative method. The research was conducted by collecting data in the field. It is presented by describing the data and then analyzed for clarity. Information was obtained through interviewing. Observing. And documenting. The study included 23 participants. Including families who received livable houses and the village government of Sungai Jalau. The findings of this study are: First. The need for livable houses in Sungai Jalau Village has not been maximized. Second. The receivers' ability to control the environment after getting a livable home is quite good. Also. The receivers' ability to access resources related to work and social activities is poor not good.

Keywords: empowerment, poor society, livable housing program

Pendahuluan

Istilah pemberdayaan masyarakat gencar digaungkan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Peningkatan taraf hidup masyarakat ini digalakkan dalam rangka melaksanakan pembangunan. Di Indonesia, sejak tahun 1950-an sampai sekarang berbagai pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat.¹ Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam berbagai kebijakan pembangunan. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan kebutuhan masyarakat supaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan menjadikan manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi untuk membangun dan mengelolah dunia sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Surat *Ar-Ra'd* (13) ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

"..Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.." (QS *Ar-Ra'd*: (13):11)

Islam merupakan agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sebagai agama gerakan atau perubahan.² Perubahan akan terjadi ketika manusia mau menggunakan akal dan fikirannya untuk berbuat dan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Islam mengharapakan umat Islam untuk Berjaya dalam segala bidang, tidak bergantung kepada uluran tangan pemerintah maupun para darmawan. Memeang Islam mengajarkan kepedulian, tetapi seperti apa bentuk kepedulian yang seharusnya dilakukan? Seharusnya pemerataan kepedulian terhadap sesama yang menjadi perhatian senua kalangan. Manusia yang diberi kelapangan rezki, kesehatan yang bagus, usaha yang jaya, jabatan yang hebat, kekuasaan yang besar, diharapkan mampu memberikan

¹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2011), h. 65

² Nanih Mahendrawaty, *et al*, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 41

kesempatan kepada masyarakat yang berkekurangan kepedulian dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, orang miskin yang sehat, kuat diberikan lowongan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Jika memungkinkan dibantu pembekalan kemampuan sesuai dengan minatnya. Orang sakit, jompo, anak terlantar diberikan bantuan berupa kebutuhan pokoknya berupa pangan, sandang, dan papan. Anak-anak sekolah dibantu biaya pendidikan dengan syarat prestasinya harus meningkat, dan lain sebagainya. Jadi, kepedulian tidak harus dalam bentuk pemberian langsung semata karena yang diharapkan adalah keberdayaan yang berkelanjutan bukan yang bersifat sementara. Inilah catatan dalam pemberdayaan masyarakat yang masih harus dipahami dan dilakukan sesuai dengan kosep-konsep pemberdayaan.

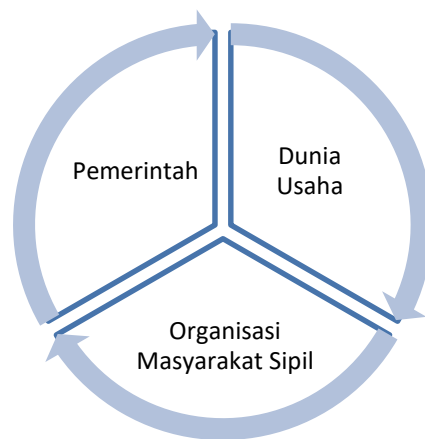
Totok Murdikanto mengatakan pemberdayaan merupakan upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya sehingga dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain sebagainya.³ Masyarakat harus mampu mengidentifikasi yang dibutuhkan kemudian mencari upaya untuk memenuhinya. Harus ada upaya untuk memperoleh sesuatu supaya tidak kehilangan makna dalam pemanfaatannya.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan masyarakat. Masyarakat yang mandiri mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan yang dilakukan. Oleh karena itu, Masyarakat harus mengetahui indikator yang bisa menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Indikator tersebut telah dirangkum oleh Schuler, Hashemi, dan Riley, mereka mengemukakan ada delapan indikator pemberdayaan, indikator tersebut yaitu: *Pertama*: kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi sendirian ke tempat-tempat tertentu seperti pasar, bioskop, tempat kerja dan sebagainya. *Kedua*: kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan pribadi tanpa harus meminta izin pasangannya terlebih dahulu. *Ketiga*: kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang tersier dan sekunder dengan inisiatif sendiri. *Keempat*: terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan-keputusan sendiri atau bersama istri berkenaan

³ Totok Mardikanto, *et al*, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 27

dengan keputusan bersama seperti renovasi rumah dan sebagainya. *Kelima*: kebebasan relatif dari dominasi keluarga: bebas dari intimidasi tentang keputusan-keputusan penting. *Keenam*: kesadaran hukum dan politik: mengetahui informasi mengenai hukum atau politik. *Ketujuh*: keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: kemampuan untuk mengikuti kampanye atau bisa terlibat dalam protes tentang kesenjangan hukum yang terjadi. *Kedelapan*: *jaminan* ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: kemampuan memiliki rumah. tanah. asset produktif. tabungan dan sebagainya.⁴

Menurut Sri Widayanti pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh pemerintah, lembaga, organisasi masyarakat, atau individu. Setiap orang mampu menjadi pelaku pemberdayaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya seperti guru, dosen, aktivis politisi, pekerja sosial, ulama, investor, pemerintah, atau rakyat biasa. Adapun pelaku pemberdayaan dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1: Pelaku pemberdayaan masyarakat⁵

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat agar mampu melakukan perubahan perilaku ke arah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku yang diharapkan meliputi aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka.⁶ Semua komponen yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat harus bersinergi untuk membantu masyarakat supaya bisa keluar dari ketidakberdayaan.

⁴ *Ibid*, h. 289-290

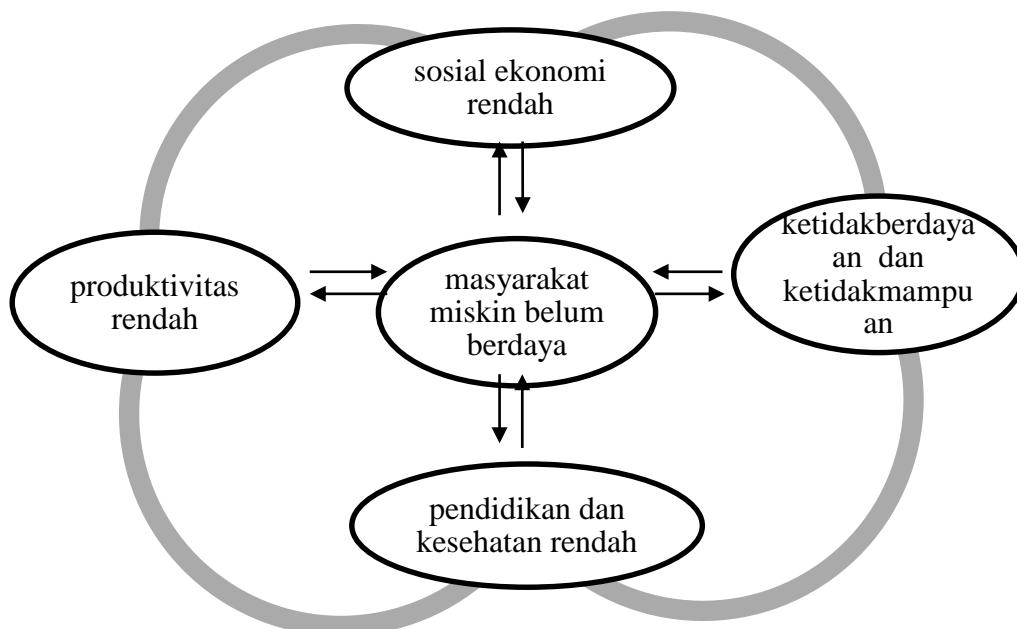
⁵ Sri Widayanti, *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis* (Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial), Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012.

⁶ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 55

Pemberdayaan harus mengedepankan kerjasama dengan prinsip tolong menolong. Sesuai dengan firman Allah yaitu:

“Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah. sungguh. siksaan Allah sangat berat. (QS. Al-Maidah (5): 2).

Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan dan dipengaruhi oleh berbagai hal. Menurut I Dewa kondisi masyarakat miskin disebabkan oleh siklus yang mengelilinginya dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Siklus kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Siklus kemiskinan masyarakat⁷

Siklus diatas menggambarkan ketidakberdayaan masyarakat dimulai dari sosial ekonomi yang rendah. Keadaan ini membuat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan kurang berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu permasalahan kemiskinan juga terjadi di Desa Sungai Jalau. Kondisi masyarakat miskin di Desa Sungai Jalau cukup beragam. Kondisi ini bisa dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Desa Sungai Jalau bekerja sebagai petani. penyadap karet. pencari ikan. pengumpul barang bekas. pekerja harian.

⁷ I Dewa Gede Agung Diasana Putra, *et al*, Pemenuhan atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, (Jurnal Pemukiman Natah, Vol. 5 No. 2, Agustus 2007), h. 105

tukang ojek, dan sebagainya. Umumnya berpenghasilan rendah sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bentuk lain kondisi kemiskinan dapat dilihat dari kondisi rumah yang ditempati masyarakat. Beberapa masyarakat miskin di Desa Sungai Jalau ada yang menempati rumah yang telah ditinggalkan, atau ditinggalkan sementara oleh pemiliknya dengan membuat berbagai kesepakatan dengan pemilik rumah yang sah untuk bisa tinggal di rumah kosong mereka. Selain itu, ada masyarakat yang tinggal dalam satu rumah lebih dari dua KK (Kepala Keluarga). Kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk membuat rumah layak huni sebagai tempat tinggal. Ini menyebabkan masyarakat terpaksa mendiami rumah yang seadanya, hanya untuk melindungi diri dari panas dan hujan tanpa dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi rumah yang jauh dari standar layak juga akan mempengaruhi orang yang tinggal didalamnya terutama kesehatan.

Telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan yang mengatakan: rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.⁸

Penyediaan rumah layak huni telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2008 pasal 2 yang menyatakan:

1. Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
2. Untuk memberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.⁹

⁸ Undang – undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman

⁹ Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tahun 2008

Pemerintah Kabupaten Kampar juga melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Kegiatan ini dicetuskan dalam tiga zero upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kampar, yaitu: zero kemiskinan, zero pengangguran, dan zero rumah kumuh.¹⁰ Zero rumah kumuh dilakukan pemerintah dengan memberikan bantuan rumah layak huni kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan program rumah layak huni di Kabupaten Kampar ditangani oleh Dinas Pekerja Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar sesuai Peraturan Daerah No 6 tahun 2008 pasal 28 yang menyatakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang bertanggung jawab dalam pelaksanaan bidang rumah layak huni bagi masyarakat desa.¹¹ Pemerintah desa bertugas menentukan masyarakat yang berhak memperoleh rumah layak huni dan ikut dalam kegiatan dan pengawasan pembangunan rumah layak huni tersebut.

Kondisi rumah bantuan yang telah diterima masyarakat kondisinya beragam. Penetapan penerima rumah bantuan yang tidak mengutamakan prioritas calon penerima. Selain itu persyaratan yang memberatkan seperti harus mempunyai lahan, muncul kecemburuan sosial dari masyarakat miskin yang tidak mendapatkan rumah. Peningkatan taraf hidup belum begitu terlihat. Banyak spekulasi yang muncul sejak bantuan rumah layak huni diterima masyarakat. Ada yang beranggapan positif dan ada yang tidak suka dengan beragam alasan. Berangkat dari fenomena-fenomena di lapangan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam lagi bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan dalam program rumah layak huni.

Metode

Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yaitu menyajikan fakta dan gejala yang ada di lapangan kemudian dianalisis sehingga dipahami secara jelas pemaparannya. Penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang telah memperoleh bantuan rumah layak huni di Desa Sungai Jalau sebanyak 23 KK. Informan selanjutnya adalah kepala desa, aparat desa, serta tokoh masyarakat yang mengetahui tentang program rumah layak huni. Pemilihan informan menggunakan pertimbangan

¹⁰ Sunardi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, *Pemkab Telah Buat Program Masyarakat Punya Peran Capai Tiga Zero*, (kamparkab.go.id: Bangkinang), Senin, 06 April 2015, 18:02:21 WIB.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2008

proposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini dilakukan untuk mendapatkan orang-orang yang memiliki kriteria tertentu dan dianggap paling tahu tentang topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Kemudian penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Selanjutnya verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dan memverifikasi masalah hasil temuan menjawab rumusan masalah penelitian yang dirumuskan sejak awal. Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisisnya kemudian dipahami atau dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori-teori pemberdayaan masyarakat. Setelah semua tahap selesai dilakukan terakhir data tersebut dideskripsikan.

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk dan proses pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Sungai Jalau

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan yang bisa mempengaruhi kesehatan penghuninya. Program rumah layak huni di Desa Sungai Jalau merupakan kegiatan pemberian bantuan berupa rumah kepada masyarakat miskin oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Pendanaan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Kampar berasal dari dana APBD provinsi dan APBD kabupaten.

Program rumah layak huni (RLH) dimulai sejak tahun 2009 dan akan terus dilaksanakan hingga tahun 2025. Program rumah layak huni bersifat berkelanjutan sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap tahun akan ada masyarakat miskin yang menerima bantuan rumah layak huni. Rumah layak huni akan diterima masyarakat apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan-persyaratan tersebut yaitu: memiliki kartu identitas lengkap (KTP. KK). terdaftar sebagai keluarga miskin di wilayah setempat. tidak memiliki rumah/memiliki

rumah tapi tidak layak. mempunyai lahan/tanah pribadi dilengkapi dengan surat tanah. Syarat lain yang harus diperhatikan dalam menentukan calon penerima bantuan rumah layak huni adalah status perkawinan (janda. duda. utuh). diutamakan berusia lanjut. tidak mempunyai penghasilan tetap. berdomisili minimal 5 tahun di desa setempat.

Penulis menemukan ada masyarakat miskin yang terdaftar sebagai calon penerima rumah layak huni sejak tahun 2009. tetapi sampai sekarang belum mendapatkannya. Seperti M. Arif hanya memiliki lahan 8 x 10 M². Ini tidak memenuhi syarat karena ukurannya tidak cukup 12 x 12 M². Begitu juga dengan masyarakat lain yang mempunyai lahan tetapi ukurannya tidak mencukupi. seperti Barullah (10 x 12 M²). Gadai (10 x 12 M²). Kamaruddin (10 x 12 M²). Edi Candra (10 x 12 M²). M. Syafri (8 x 12 M²). Mansur (9 x 10 M²). Bakri (7 x 12 M²).¹²

Masalah lain yang terjadi terkait prioritas dalam menentukan penerima rumah bantuan layak huni juga kurang diperhatikan. Hal seperti ini menimbulkan isu-isu yang tidak baik. Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat karena pemerintah dinilai tidak adil dalam membuat kebijakan. Jika dibiarkan berlarut-larut. kepercayaan masyarakat kepada aparat desa akan hilang. Seperti. masyarakat menganggap pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Ada ketimpangan dalam membuat keputusan. dan sebagainya.

Secara aturan ini juga menyalahi prinsip dan pedoman pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Prinsip pembangunan rumah layak huni salah satunya adalah transparan. Kemudian pedoman pelaksanaan rumah layak huni juga harus berorientasi kepada masyarakat miskin. Agar hal seperti ini tidak terjadi lagi maka harus ada pengawasan yang transparan terhadap semua informasi yang berkenaan dengan pembangunan yang dibuat untuk masyarakat miskin. Selanjutnya. pemerintah sebagai penanggung jawab program harus mampu meredakan isu-isu yang muncul dalam masyarakat. Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat jika dibiarkan bisa memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan program dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. bukan melahirkan permasalahan baru dalam masyarakat. Pemberian rumah layak huni yang diberikan pemerintah mendapat tanggapan positif dari masyarakat miskin yang memperoleh bantuan ini. Terlihat ada

¹² Dokumentasi

perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat melalui kenyamanan tempat tinggalnya yang baru, semakin semangat untuk bekerja, semakin bahagia, kesehatan semakin membaik, hubungan dengan tetangga juga semakin nyaman dari sebelumnya.

B. Kemampuan masyarakat miskin mengontrol lingkungannya di Desa Sungai Jalau setelah mendapatkan rumah layak huni

1. Terjaminnya keamanan masyarakat di lingkungannya

Salah satu tujuan pemberian rumah layak huni bagi masyarakat miskin adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa rumah yang layak ditempati. Rumah yang dibangun harus memenuhi syarat keselamatan. luas bangunan dan menunjang kesehatan penghuninya. Semua ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Lingkungan yang nyaman dan aman selalu menjadi dambaan setiap orang. Setiap orang selalu menginginkan keamanan ketika berada di rumah ataupun ketika meninggalkan rumah. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengatur hidupnya.

Berdasarkan kondisi masyarakat miskin yang memperoleh bantuan rumah layak huni di Desa Sungai Jalau kondisi rumah yang dibangun memenuhi standar keselamatan dan luas lingkungan. Sampai saat ini belum ada rumah yang gagal dibangun. Gagal dalam artian tidak mengikuti konstruksi. Dari jumlah KK penerima rumah layak huni semuanya memenuhi syarat terkait bentuk bangunan dan luas lahan yang dimiliki. Sisa tanah pembangunan rumah layak huni bisa dimanfaatkan kembali. Seperti memanfaatkan lahan di depan rumahnya untuk menanam Ubi Kayu (Singkong). Tebu. Serai. Kunyit. Jahe. Lengkuas. Pandan Wangi. Ada juga yang menanam Sirih. Pisang. Pinang. Bunga. dan lain sebagainya. Pemanfaatan lingkungan ini sangat bagus. Sekecil apapun lahan yang ada harus dimanfaatkan. Meski hanya menanam tanaman rempah yang dipakai sehari-hari. ini bisa berguna untuk mengurangi pengeluaran belanja dapur. Uang tersebut bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya. Ini juga termasuk dalam upaya pemberdayaan dalam bentuk memanfaatkan potensi lingkungan.

Pemberdayaan harus bersifat menyeluruh. tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat. tetapi juga pranata-pranatanya. Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa masyarakat tidak takut lagi untuk meninggalkan rumahnya. Rumah sudah aman untuk ditinggalkan. Anak-anak juga suka bermain di halaman rumah. Sekarang keamanan keluarga lebih terjamin setelah memperoleh rumah layak huni. Keluarga lebih leluasa untuk beraktivitas di luar rumah setelah mendapatkan rumah layak huni.

Konsep pemberdayaan menurut Randy R. Wiratnolo pemberian rumah layak huni bisa dipandang sebagai upaya pemberian kemampuan atau keberdayaan (*to give ability to*) sehingga bisa menciptakan peluang aktualisasi keberdayaan seseorang. Pemberdayaan masyarakat selain untuk penguatan individu juga untuk penguatan pranata-pranatanya. Untuk melakukan ini harus ada rasa aman ketika berada di lingkungannya. Lingkungan yang aman akan membuat seseorang nyaman sehingga membuka peluang baginya untuk membuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan nilai.

Lebih tegasnya pemberian rumah layak huni ini bisa dipandang sebagai salah satu pranata yang bisa digunakan untuk jalan memberdayakan masyarakat. Rumah layak huni bisa menjadi pembuka peluang untuk menjadikan seseorang berdaya. Terlihat dari dampak positif yang muncul bagi masyarakat miskin yang memperoleh rumah bantuan tersebut. Rasa aman. pemeliharaan kesehatan. tempat berkreasi. menciptakan ide-ide kreatif. semuanya bisa berawal dari rumah yang layak untuk ditempati. Semua ini bisa didapatkan apabila masyarakat mampu menata hidupnya dengan bijaksana.

2. Terjamin hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat

Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan hak dasar seseorang (hak hidup. keadilan. mendapat perlindungan. pelayanan. dan sebagainya) dalam hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat hak orang miskin sering dirampas baik disengaja ataupun tidak sengaja. Mereka juga sering diintimidasi dan didiskriminasi oleh lingkungan sekitarnya. Terkait dengan bantuan rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat miskin bisa dikaitkan dengan hak mereka untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Dengan harapan setelah mendapatkan rumah yang layak tidak ada orang yang mengucilkan mereka dan taraf hidup mereka bisa

ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan salah satu makna pemberdayaan yang berupaya untuk memberikan perlindungan mencegah yang lemah bertambah lemah. Sejak memperoleh rumah layak huni masyarakat berani untuk ikut dalam organisasi sosial yang ada dalam masyarakat. Masyarakat juga berani mengeluarkan pendapat. Bertanya dalam kegiatan pengajian, dan tidak menjauh dari orang lain.

Masyarakat mengikuti organisasi sosial masyarakat seperti: majlis taklim. Arisan, PKK, kegiatan PHBI. menjenguk masyarakat yang sakit. yasinan ibu-ibu dan lain sebagainya. Masyarakat juga mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid atau mushala seperti didikan subuh. mengaji. latihan shalat. dan sebagainya. Semenjak memperoleh rumah layak huni fikirannya tidak serisau dulu sehingga sekarang bisa lebih fokus mengurus keluarganya. Penerima rumah layak huni sudah bisa membuat rencana-rencana yang bisa menunjang kehidupan keluarganya. Penerima rumah layak huni juga mendapatkan pelayanan kesehatan. bantuan pendidikan. Bantuan Langsung Tunai. Raskin. Program Keluarga Harapan. dan sebagainya. Menurutnya sebagian besar penerima rumah layak huni juga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Terkait dengan perlakuan masyarakat.

Kemampuan seseorang untuk pergi ketempat-tempat yang diinginkan termasuk indikator pertama (kebebasan mobilitas) yang harus dimiliki. Kebebasan mobilitas ditandai dengan kemampuan seseorang untuk pergi sendirian ke tempat-tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemampuan ini harus dipertahankan karena jika seseorang tidak sanggup untuk pergi ke suatu tempat maka ia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Indikator lain yang telah terpenuhi yaitu keberanian untuk membuat keputusan terkait kemajuan keluarganya. Hal ini menunjukkan progres dalam kehidupan seseorang. Ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat semakin mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk kemajuan diri dan keluarganya.

Melalui pemberian bantuan rumah layak huni masyarakat miskin merasa diperhatikan oleh pemerintah. Mereka merasa dilindungi dan mempunyai tempat di dalam masyarakat. Hak untuk memiliki tempat tinggal dan penghidupan yang lebih baik telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian masyarakat yang telah mendapat rumah layak huni sudah ada yang bisa meningkatkan pendidikan anaknya sampai ke

Perguruan Tinggi. Semua ini bisa dilakukan karena mengalami peningkatan ekonomi setelah mendapatkan rumah layak huni. Dengan demikian hak untuk mendapat pendidikan juga bisa terbantu dengan adanya bantuan rumah layak huni tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dipahami secara umum masyarakat miskin di Desa Sungai Jalau yang menerima rumah layak huni telah terjamin hak dasarnya dalam kehidupannya bermasyarakat. Semenjak mendapatkan rumah layak huni masyarakat bisa merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan taraf hidup. peningkatan pendidikan. berani berinteraksi dengan orang lain. bergabung dalam organisasi sosial masyarakat. merupakan tanda orang yang berdaya. Meskipun masih ada yang bersikap kurang baik kepada mereka. Hal ini tidak menjadi persoalan karena itu merupakan konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Bebas dari rasa takut dan khawatir ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pemberian rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah disambut dengan baik oleh penerima bantuan rumah layak huni. Ada ketenangan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari yang dirasakan masyarakat setelah memperoleh rumah layak huni. Selama ini ada rasa khawatir meninggalkan rumah karena takut kondisinya yang sangat memprihatinkan. Rumah bisa dibuka dengan gampang karena dikunci seadanya. Kemudian ketika hujan lebat juga terdapat bocor dimana-mana. Terkadang juga ada rasa minder atau rendah diri ketika berinteraksi dengan orang lain karena kondisi rumah yang tidak layak. Setelah mendapatkan rumah bantuan kondisi ini sudah dapat diatasi, perlahan-lahan juga terlihat ada perubahan taraf hidup masyarakat yang telah mempunyai rumah layak huni. Kehidupan masyarakat lebih nyaman, lingkungan lebih bersih, ekonomi juga semakin membaik, tetapi tidak semuanya. Ada juga masyarakat penerima rumah layak huni yang tidak begitu terlihat perubahan kehidupannya. Kondisi ini diakibatkan oleh sikap hidup masyarakat yang hanya menerima dan tidak ada usaha lebih dalam kesehariannya. Tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Ini yang mengakibatkan masyarakat penerima rumah layak huni masih bersifat statis secara finansial, tingkat pendidikan, kehidupan sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas tujuan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar (rumah yang layak) telah tercapai. Ini bisa dilihat dari

kenyamanan. ketenangan. berada di rumah dan kebebasan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya. Apabila kebutuhan dasar telah terpenuhi maka tahap selanjutnya masyarakat harus berupaya mendapatkan akses agar bisa mengolah sumber-sumber produktif yang ada di sekitarnya. Akses bisa berupa modal dan kesempatan seperti tanah, uang, kesehatan, pendidikan, keterampilan, hubungan baik dengan orang lain, dan sebagainya. Akses berupa modal bisa diartikan sebagai keterjangkauan dan kemampuan untuk memanfaatkannya kesempatan yang ada kapan saja dan dimana saja. Jadi harus ada kemampuan seseorang untuk menggunakan modal yang ia miliki untuk bisa mengolah sumber-sumber produktif yang ada di lingkungannya.

C. Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Aksesibilitas Sumber Daya Terkait dengan Pekerjaan dan Aktivitas Sosialnya di Desa Sungai Jalau

Kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup ditunjang atau dipengaruhi oleh akses yang dimiliki. Akses bisa dibagi dua yaitu. akses untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. dan akses yang digunakan untuk mengolah sumberdaya yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan kemampuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosialnya juga dipengaruhi oleh akses yang dimiliki. Semuanya akan mempengaruhi taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi aksesibilitas sumberdaya terkait pekerjaan dan aktivitas sosialnya dapat dilihat dari:

1. Ada informasi dan teknologi yang digunakan untuk mempermudah komunikasi dan pekerjaan

Kehidupan manusia saat ini tidak bisa lepas dari pengaruh informasi dan teknologi. Saat ini informasi dan teknologi mampu meringankan aktivitas manusia dalam melaksanakan sesuatu. Ketersediaan media informasi dan teknologi bisa digunakan untuk menunjang sumberdaya manusia agar bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Informasi dan teknologi merupakan kebutuhan manusia saat ini.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan media yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah papan informasi desa yang di letakkan di masjid dan mushalla. Kertas informasi yang ditempal di tempat-tempat strategis desa seperti di Posyandu, balai-balai desa, dan warung-warung

masyarakat, dan pengeras suara yang digunakan untuk memberikan informasi secara langsung kepada warga terkait hal-hal yang terjadi secara mendadak seperti kematian, musibah alam, dan sebagainya.

Secara umum masyarakat yang telah mendapatkan rumah layak huni telah menggunakan beberapa media informasi dan teknologi untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Seperti handphone, Motor, Televisi dan berbagai barang elektronik di rumahnya. Hanya saja untuk penggunaan aplikasi-aplikasi informasi masyarakat masih sangat kurang karena kemampuan membeli paket data, kemampuan menggunakan aplikasi seperti *whatsaap* (WA), instagram, facebook, dan sebagainya masih kurang. Ditambah lagi jaringan internet di Desa Sungai Jalau sering mengalami gangguan. Tetapi karena aktivitas masyarakat penerima bantuan rumah layak huni biasanya hanya di di desa kondisi ini tidak menjadi masalah. Bahkan saat ini sudah ada penerima rumah layak huni yang telah melakukan penambahan ruang belakang bagian rumahnya yang akan dijadikan dapur dan gudang untuk menyimpan barang-barang.

2. Sarana dan prasarana dalam bekerja

Apapun pekerjaan yang dilakukan harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat untuk mempermudah dan menjadi penunjang keberhasilan suatu proses atau usaha yang dilakukan agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sarana dan prasara yang bagus akan mempengaruhi hasil dari usaha yang dilakukan.

Lahan perkebunan di Desa Sungai Jalau sekitar 80% dari jumlah total luas wilayahnya. Potensi yang sangat besar ini harus ditunjang oleh sarana yang memadai agar bisa dikelola dengan baik. Apabila karet atau sawit yang ada ditunjang dengan sarana yang optimal maka akan meningkatkan produksi susu karet atau tandan buah sawit. Harga jualnya juga akan bagus sehingga penghasilan masyarakat bisa bertambah dan perekonomian masyarakat akan meningkat. Untuk sarana jalan pemerintah telah melakukan perbaikan tetapi memang belum 100%.

Secara umum masyarakat miskin di Desa Sungai Jalau berprofesi sebagai penyadap karet, petani, pencari ikan, dan buruh harian. Masyarakat yang bekerja sebagai penyadap karet biasanya masih dilakukan secara tradisional dan jarang melakukan perawatan berupa pemupukan karena biaya pupuk yang mahal.

Masyarakat hanya memakai pisau toreh yang kualitasnya standar. Begitu juga masyarakat pencari ikan hanya menggunakan jala, bubu, dan kail sederhana. Semua prosesnya dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan dan pengalaman. Tidak ada informasi dan kegiatan penunjang dan upaya penambahan alat yang digunakan untuk membantu pekerjaannya.

Kebun karet yang dimiliki masyarakat miskin kebanyakan sudah berusia tua dan tidak diremajakan dengan alasan hanya mempunyai sebidang lahan jika diremajakan maka waktu produksinya akan sangat lama sedangkan pekerjaan yang lain tidak ada. Alasan diatas sebetulnya bisa dijawab dengan ketersediaan potensi lahan lain (lahan tidur) yang ada di Desa Sungai Jalau dan tidak diolah pemiliknnya.

Desa Sungai Jalau mempunyai potensi perkebunan yang cukup besar. Ada 1.750 ha lahan perkebunan karet dan perkebunan sawit. Potensi lain yang dimiliki berupa lahan hijau yang luas untuk peternakan namun masih kurang dimanfaatkan. Selain itu di Desa Sungai Jalau terdapat sungai-sungai dan hutan yang menyimpan berbagai potensi hayati yang bisa dimanfaatkan seperti kayu bakar, rotan, tanaman-tanaman obat, tanaman hias, pakis-pakis, lumut, dan lain sebagainya. Hanya saja masyarakat sudah jarang memanfaatkan potensi yang ada di hutan karena tidak terbiasa, dan tidak mengetahui pasar-pasar dari potensi-potensi yang ada di hutan tersebut.

Selain itu perbaikan sarana menuju hutan dan lokasi perkebunan msyarakat juga telah dibangun oleh pemerintah daerah. Sekarang jalan menuju lahan perkebunan masyarakat telah diaspal, disemen, dan masih ada juga dalam tahap pengerasan. Begitu juga jalan menuju lahan pertanian sudah dibangun (disemen) oleh pemerintah sehingga jalannya sudah tidak becek dan sudah diperluas dari sebelumnya. Kendaraan roda dua dan roda empat (mobil), alat-alat berat (tractor) dan sejenisnya sudah bisa sampai ke lahan pertanian masyarakat. Jalan yang sudah bagus ini menjadikan waktu ke kebun semakin singkat karena dapat dilalui dengan mudah dan bisa menggunakan semua jenis kendaraan.

3. Modal dan Pasar yang digunakan oleh masyarakat

Untuk menunjang kehidupan seseorang diperlukan modal yang cukup. Persoalan kemiskinan sering dikaitkan dengan modal yang tidak mencukupi atau tidak dimiliki masyarakat. Padahal modal bukan semata-mata masalah uang, tetapi

yang termasuk modal seperti kesehatan, pendidikan, keterampilan, lahan, tenaga, dan jaringan komunikasi merupakan modal yang bisa dimanfaatkan. Adapun Pasar merupakan akses masyarakat yang harus ada. Pasar adalah tempat transaksi penjualan kelebihan hasil produksi masyarakat. Pasar juga berguna untuk memasok barang-barang yang dibutuhkan masyarakat jika barang tersebut tidak ditemui di daerahnya. Melalui pasar tingkat ekonomi masyarakat juga bisa diprediksi. Hari Pasar masyarakat Desa Sungai Jalau adalah hari Sabtu. Pasar tersebut terletak di Air Tiris, dikenal dengan nama Pasar Baru (menurut masyarakat) atau Pasar Air Tiris. Pasar Air Tiris menjadi pusat perbelanjaan masyarakat karena semua keperluan masyarakat bisa diperoleh disana. Masyarakat juga bisa menjual hasil kebun atau produksi lain di pasar ini. Selain hari Sabtu masyarakat juga bisa ke Pasar hari Selasa, tetapi tidak seramai dan selengkap di hari Sabtu.

Pasar termasuk salah satu modal bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Dalam proses pemberdayaan salah satu yang harus dimiliki adalah modal. Modal merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja. Masyarakat miskin penerima layak huni umumnya mempunyai beragam modal yang bisa dimanfaatkan. Seperti lahan karet, lahan sawah, dan lahan kebun. Di Desa Sungai Jalau banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Sumber daya alam di Desa Sungai Jalau sangat besar seperti di bidang pertanian, peternakan, dan pemanfaatan hasil sungai dan hutan. Hal ini tergambar dalam dokumentasi Desa Sungai Jalau. Wilayah Desa Sungai Jalau mempunyai 88 % perkebunan dan sawah pertanian 10%. Tahun 2011 sampai tahun 2013 telah dilakukan peremajaan lahan perkebunan sekitar 45 ha, dan sekitar 150 ha perkebunan proyek penghijauan, serta 15 ha lagi peremajaan atas usaha swadaya sendiri.

Berdasarkan kondisi wilayah tersebut, akan lebih memungkinkan untuk melakukan pemberdayaan di Desa Sungai Jalau. Desa Sungai Jalau memiliki potensi alam yang cukup besar. Kondisi alam yang sangat kaya harus dikelola dengan baik. Selain program rumah layak huni, seharusnya pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kondisi wilayah harus dilaksanakan. Program pelatihan perkebunan dan pertanian harus dilakukan. Hal ini dapat memicu peningkatan hasil perkebunan dan pertanian yang ada di Desa Sungai Jalau. Pengoptimalan penggunaan potensi setempat akan sangat menguntungkan. Apabila

kegiatan yang dilakukan berhasil akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika perekonomian masyarakat meningkat maka tingkat kesejahteraan juga akan terlihat semakin baik.

Potensi alam berupa lahan hijau di Desa Sungai Jalau belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini diakibatkan karena kurang ilmu dan modal tentang cara beternak di Desa Sungai Jalau. Menyikapi hal ini pemerintah desa telah mengutus 30 orang untuk mengikuti program P4S Kubang Raya. Program P4S jika dilaksanakan dengan baik bisa memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Jalau. Kemudian di Desa Sungai Jalau juga ada usaha ekonomi desa seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Kampar Mitra Mandiri, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP). Ketiga usaha ini menyiapkan kebutuhan masyarakat. Seperti UED SP yang memberikan layanan peminjaman dan penyimpanan uang milik masyarakat. UED SP memberikan pinjaman berupa uang dengan syarat melengkapi syarat yang telah ditentukan. Apabila masyarakat tidak mampu mengembalikannya maka jaminan yang digunakan ketika meminjam akan diambil oleh pihak UED SP.

Selain potensi yang telah dibahas di atas Desa Sungai Jalau juga mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum digunakan secara optimal. Hal ini diketahui dari jumlah orang yang tidak bekerja sebanyak 857 orang. Jumlah yang sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Desa Sungai Jalau. Diantara 857 orang yang tidak bekerja pasti mempunyai berbagai kemampuan yang bisa dimanfaatkan. Seperti yang dikatakan Aprilia, dkk. setiap orang pasti mempunyai kemampuan, hanya saja kemampuan tersebut terkadang belum dikembangkan dengan optimal. Pengembangan kemampuan masyarakat yang masih menganggur harus diupayakan pembinaannya agar sumber daya alam yang dimiliki bisa dimanfaatkan.

Dilihat berdasarkan jumlah tersebut terlalu banyak jumlah orang yang tidak bekerja di Desa Sungai Jalau. Padahal Sumber Daya Alam yang dimiliki sangat banyak dan bentuknya beragam. Semua hasil Sumber Daya Alam tersebut memiliki harga jual di pasaran. Oleh karena itu semua pihak harus saling membantu untuk menyelesaikan kesenjangan yang terjadi di Desa Sungai Jalau. Semua orang mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi yang ada. Individu harus berusaha

meningkatkan kemampuannya. baik dengan motif ekonomi. agama. sosial dan sebagainya. Begitu juga masyarakat harus memberikan kepercayaan. ajak mereka bekerja sama. berikan motivasi. berikan peluang agar mereka yakin akan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat miskin.

Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh yang ditemukan di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara terkait pemberdayaan masyarakat miskin melalui program rumah layak huni yang telah dilaksanakan hasilnya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari bentuk dan proses pemenuhan kebutuhan rumah layak huni masih banyak kesenjangan dalam proses penentuan penerima bantuan rumah layak huni. Kemudian, data penerima kurang valid. dan memunculkan isu-isu ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, kemampuan masyarakat miskin mengontrol lingkungan setelah mendapat rumah layak huni cukup bagus. Dilihat dari terjaminnya keamanan masyarakat berada di lingkungannya. hak-hak masyarakat miskin telah didapatkan meski belum sepenuhnya. masyarakat lebih berdaya dari sebelumnya karena kebutuhan dasarnya berupa rumah telah terpenuhi. Adapun kemampuan masyarakat miskin memenuhi aksesibilitas sumberdaya terkait dengan pekerjaan dan aktivitas sosial kurang bagus. Dilihat dari kepemilikan jumlah alat komunikasi, teknologi, sarana dan prasarana yang digunakan masyarakat masih sedikit karena masyarakat lebih banyak menggunakan cara-cara tradisional.

Referensi

Al-Qur'an al-Karim

Ali. Muhammad. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani

Anwas, Oos. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta. 2013

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Azwar, Welhendri. 2014. *Sosiologi Dakwah*. Padang: Imam Bonjol Press

Bungin. Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam dan Varian Kontemporer)*. Jakarta: Rajawali Press

----- 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Study Sosiologi. Kebijakan Publik. Komunikasi. Manajemen. dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana

- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Dimulai dari Belakang*. cet. 2. Jakarta: LP3ES
- Harahap, Syahrin. 1999. *Islam dan Implementasi Pemberdayaan*. Kopen Banteng: PT Tiara Wacana Yogya
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. cet. 2. Bandung: Humaniora
- Husni, Thamrin. *et al.* 2009. *Kemiskinan di Riau Realitas dan Kebijakan*. Pekanbaru: Suska Press
- Kohar, Wakidul. 2009. *Komunitas Penengah Budaya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Mahendrawati, Nanih. *et al.* 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Rosdakarya
- Mardikanto, Totok. *et al.* 2013. *Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Perspektif Kebijakan Publik)*. Bandung: Alfabeta
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik. Modern. Posmodern dan Poskolonial*. Jakarta. Rajawali Perss
- Moleong. J Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mubaroghah, Siti. 2015. *Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Desa Sangatta Utara Tahun 2014*, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3, No, 2.
- Mufraini, M. Arif. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Muslim, Aziz. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta. Penerbit Teras
- Narbuko, Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nurul, Zuriyah. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Shihab, M. Quraish. 2011. *Membumikan al-Quran Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya?)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2005. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: PT Refika Aditama
- Teresa, Aprilia. *et al.* 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi. Akademis. dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Tumanggor, Rusmin *et al.* 2010. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Usman, Sunyoto. 2015. *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Wardi, Bachtiar. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta : Logos
- Wiratnolo. Randy. *et al.* 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Zulbaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup

- Alfiorina Heru Eriza. (2015). *Evaluasi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Layak Huni di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Telaga Sari Kota Surabaya*
- Arimurthy Anggi. *et al.* (2013). *Lembaga Lokal dan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol. 9 (3): 307-316
- I Ketut Alit. (2007). *Pembedayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Kumuh di Provinsi Bali*". *Jurnal Pemukiman Natak*. Vol. 3 No. 2. Agustus
- I Dewa Gede Agung Diasana dan Anak Agung Gde Yana. (2007). *Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. *Jurnal Pemukiman Natak*. Vol. 5 No. 2.
- Sri Widayanti. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis Welfare*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 1. No. 1. Januari-Juni